

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah pantai Barat Selatan Provinsi Aceh yang beribu kotakan Tapaktuan sebagai pusat administrasinya, terdapat 18 kecamatan yang ada di aceh selatan mulai dari kecamatan Labuhan Haji hingga kecamatan Trumon Timur yang perbatasan langsung dengan kabupaten aceh singkil. Dvengan demikian tentunya kesejahteraan setiap kecamatan tersebut baik dari segi pembangunan, pendidikan, ekonomi, dan aspek – aspek lainnya menjadi tanggung jawab utama pemerintah kabupaten Aceh Selatan.

Seiring dengan berkembangnya zaman terutama di bidang pendidikan dan teknologi tak heran di Aceh Selatan sendiri maupun setiap wilayah lainnya lahir begitu banyak putra putri intelektual di kalangan masyarakat dengan tujuan membangun daerah. maka dari itu salah satu wadah yang menjadi tujuan mereka adalah partai politik mengingat kekuatan partai politik yang telah menjadi salah satu perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam membangun daerah khususnya pada wilayah – wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan daerah atau kabupaten. Dunia perpolitikan Aceh Selatan sangat banyak di hiasi Partai -partai politik baik dari partai nasioal maupun partai lokal ,yang terus berlomba-lomba menjadi partai terbaik dengan menawarkan solusi bagi setiap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat Aceh Selatan. Mulai dari parawisata, budaya, infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi sekalipun. sehingga masyarakat Aceh Selatan merasa kesejahteraannya terpenuhi.

Adapun Pengertian partai politik ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aceh sendiri memiliki beberapa partai politik lokal salah satunya Partai Nanggroe Aceh (PNA) (Maulana, 2020).

Partai politik lokal di Aceh pada awalnya dibentuk atas kesepakatan antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Terciptanya partai lokal di Aceh tidak terlepas dari MoU pasca konflik Aceh, salah satu dari sekian banyak partai lokal yang terbentuk, Partai Nanggroe Aceh (PNA) merupakan salah satunya. Sebelum tahun 2017, partai ini bernama Partai Nasional Aceh. Partai tersebut didirikan oleh Irwandi Yusuf mantan Gubernur Aceh atas dasar strategi baru agar dapat menyeimbangkan dengan partai terbesar di Aceh yaitu Partai Aceh sehingga melawan sistem Partai Aceh (PA) walaupun Irwandi Yusuf merupakan kader terbaik Partai Aceh dan mengambil sikap untuk keluar dari partai tersebut yang disebabkan ada permasalahan ditubuh internal Partai Aceh dan beliau menganggap Partai Aceh kurang memberikan ruang kepadanya pada saat itu. Selain hal tersebut, Partai Nanggroe Aceh juga merupakan katalisator bagi ekskobatan yang tergolong dalam “kubu Irwandi” yang memiliki cita-cita untuk membentuk proses politik ideal pasca konflik (Nofriadi, 2021).

Di Aceh Selatan sendiri Partai Nanggroe Aceh (PNA) dipimpin oleh seorang figur penting atau tokoh politik yaitu Tgk.Amran yang berhasil mendominasi wilayah Aceh Selatan dan menjabat sebagai Wakil Bupati terpilih periode 2019-2023. Di Aceh Selatan Partai Nanggroe Aceh (PNA) juga merupakan partai yang banyak di minati oleh masyarakat intelektual untuk bergabung di internalnya dengan tujuan bersama yaitu mencedaskan kehidupan anak negeri dan mensejahterakan masyarakat (Maulana, 2020).

Demokrasi juga mengatakan bahwa Pemilu Legislatif adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme check and balances terhadap partai yang berkuasa atau ruling party. Meski banyak kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis, namun praktek demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan/ pengisian jabatan-jabatan publik di semua negara demokratis. Artinya bahwa pemilu legislatif telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis. Tujuan utama Pemilu legislatif adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta menentukan pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi tingkat lokal. (Arniti, 2020)

Pada kontestasi politik Tahun 2014, partai PNA sebenarnya hanya mendapatkan 1 kursi anggota Legislatif. Situasi ini, tidak berbanding lurus dengan perolehan suara dari partai politik besar lainnya yang ikut pemilu legislatif di

Aceh Selatan. Salah satunya ialah partai PA, yang berada di urutan pertama sebagai partai dengan perolehan suara sah terbanyak yakni 16.873 atau 14,78%, disusul Partai Demokrat 11.591 (10,15%), PKPI 10.503 (9,2%), NasDem 9,473 (8,3%), Golkar 8.934 (7,83%), PPP 8.788 (7,7%), PAN 7.533 (6,6%), Hanura 6.377 (5,59%), PKB 5.764 (5,05%), PBB 5.606 (4,91%), Gerindra 5.270 (4,62%), PNA 4.902 (4,29%), PDIP 4.447 (3,9%), PDA 4.069 (3,56%) dan terakhir PKS 4.041 (3,54%) (www.medanbisnisdaily.com diakses pada 16 Oktober 2019).

Disisi lainnya, perolehan suara partai PNA hanya 4,29 % di pemilu legislatif 2019. Fenomena ini, diyakini penulis dikarenakan bargaining power yang terjadi antara figure disalah satu partai tidak menguat dalam upaya menciptakan relasi politik. Bargaining power atau kekuatan politik dimaksudkan sebuah hubungan psikologis antara pihak pelaksana dan pihak yang terkena (lawan politik).

Pada Pemilihan umum legislatif tahun 2019 yang telah berlangsung, PNA merupakan salah satu partai lokal di Aceh yang memiliki perolehan suara terbanyak, salah satunya di Kabupaten Aceh Selatan. Pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Selatan, suara partai meningkat tajam dari pemilu sebelumnya 2014 yang hanya mendapatkan 1 (satu) kursi, menjadi 6 (kursi) di tahun 2019. Dilihat dari jumlah perolehan suara tersebut, PNA berhasil mendapatkan suara terbanyak di keseluruhan Dapil, dengan total Dapil berjumlah 5 Dapil di Kabupaten Aceh selatan tersebut (Maulana, 2020).

Kemenangan PNA di Tahun 2019, pada umumnya mengubah kedudukan perolehan kursi legislatif di Tahun 2014. Di tahun 2024 mendatang , Partai PNA

diharapkan dapat memperoleh kursi anggota legislatif yang lebih unggul dan mendominasi dibandingkan partai politik lokal lainnya di tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah kursi anggota legislatif untuk partai PNA dari tahun sebelumnya jauh lebih besar dari Tahun 2014.

Pertarungan kursi dan politik tersebut, diikuti oleh 19 partai politik baik, partai politik nasional hingga partai politik lokal dengan jumlah calon peserta legislatif sebanyak 510 orang (www.daerah.sindonews.com diakses pada 1 September 2019). Dengan daerah pemilihan diantaranya : Dapil I, Kecamatan Labuhan Haji, Labuhan Haji Barat, dan Labuhan Haji Timur. Dapil II, Kecamatan Sawang serta Meukek. Di Dapil III, Kecamatan Tapaktuan dan Samadua. Dapil IV, Kecamatan Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Timur, dan Kluet Selatan. Dan pada daerah pemilihan (dapil) V terdapat Kecamatan Bakongan, Kota Bahagia, Bakongan Timur, Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur.

Tabel 1.1 Hasil Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu Legislatif 2019 di Aceh Selatan

No.	Nama Partai	Dapil					Total Suara
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1047			1221		2268
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya			1875	571		2446
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	-					-
4.	Partai Golongan Karya			1334			1334
5.	Partai Nasdem	1315			792	2041	4148
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	-	-	-	-
7.	Partai Berkarya	-	-	-	-	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	-	-	-	-	-	-

9.	Partai Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan			1223			1223
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-	-
12	Partai Amanat Nasional		1471		1134		2605
13	Partai Hati Nurani Rakyat				677		677
14	Partai Demokrat	1215		1257	1277	1270	5019
15	Partai Aceh	1450			1108	1098	3656
16	Partai SIRA	-	-	-	-	-	-
17	Partai Daerah Aceh		1058		810		1868
18	Partai Nanggroe Aceh	1466	915	1382	926	1467	7472
19	Partai Bulan Bintang		939				939
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		2237		909		3146

Sumber: KIP Aceh selatan

Dalam dunia perpolitikan ada yang namanya strategi dalam pemenangan pemilu, Partai Nanggroe Aceh (PNA) perlu mengorganisir kegiatan kampanye sama halnya seperti partai politik pada umumnya. Namun demikian, kampanye yang biasanya dilakukan partai hanya sekedar kampanye pemilu bukan kampanye politik yang hasilnya akan lebih signifikan baik bagi partai maupun bagi konstituen.

Selama ini kampanye yang dilakukan Partai PNA di Aceh Selatan adalah dengan melakukan audiensi dengan pimpinan dan Komisi I DPRK Aceh Selatan terkait penguatan kelembagaan dalam menghadapi pelaksanaan pemilu dan

pemilihan tahun 2024, Menyelenggarakan deklarasi kampanye damai para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, termasuk pasangan calon yang didukung oleh PNA, Launching Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan tujuan untuk membangun kesadaran politik masyarakat menjadi pemilih yang mandiri dan rasional serta meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih. Sejauh ini kegiatan Kampanye yang telah dilakukan oleh PNA hanyalah kampanye pemilu bukan kampanye politik. Partai PNA seharusnya melakukan kegiatan kampanye seperti pada umumnya yang dilakukan partai lainnya seperti kampanye orientasi kandidat, kampanye ideologi atau berdasarkan tujuan partai, kampanye cetak, kampanye media sosial dan kampanye tatap muka (Kuncie, 2023).

Kemenangan dan dominasi PNA pada pemilu Legislatif tahun 2019 tidak lain di latar belakang oleh sosok terpandang di Aceh Selatan yang merupakan seorang veteran kombatan GAM di wilayah Tapaktuan sebagai seorang Panglima (Abrar Muda Politisi dan salah satu pendiri PNA). Abrar sangat berpengaruh bagi PNA begitu juga dengan Bacaleg dan kader partai PNA. Abrar mempunyai nama dimasyarakat dan sangat dipandang para petinggi di Aceh Selatan. Kehadiran Sosok abrar diantara kader partai menjadi tolak ukur peningkatan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2019. Pengaruh Abrar muda menjadi terobosan bagi PNA untuk memperoleh kursi yang lebih unggul di parlemen dan menjadi salah satu Strategi Pemenangan bagi PNA untuk peluang mendapatkan kursi lebih banyak dari 2019 di pemilu 2024 nantinya apalagi calon langsung diusungkan oleh Abrar Muda.

Maka dari latar belakang di atas, terkait bagaimana strategi Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang merupakan partai lokal di Aceh yang memiliki peran penting terhadap perubahan daerah sehingga membuat penulis tertarik untuk mengupayakan pada karya tulis ini dengan judul “Strategi Pemenangan Partai Nanggroe Aceh (PNA) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Aceh Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2024?
2. Apa saja hambatan Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalam menerapkan strategi pemenangan di pemilu legislatif tahun 2024?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Strategi dari Bacaleg partai nanggroe aceh untuk memperoleh peningkatan kursi di pemilihan Legislatif di tahun 2024 dan Hambatan apa saja yang dihadapi PNA dalam proses tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi pemenangan Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalam pemilu legislatif 2024 di Aceh Selatan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalam penerapan strategi pemenangan pemilu legislatif 2024 di Aceh Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
Penelitian ini di harapkan memiliki manfaat bagi penulis dan pembaca untuk menambah pengetahuan tentang Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalam kehidupan sehari baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu juga untuk Dapat menambah wawasan pembaca mengenai strategi pemenangan Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalam pemilu legislatif 2024 di Aceh Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil penelitian sebelumnya yang dapat berasal dari berbagai sumber ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal penelitian. Penelitian sebelumnya berguna untuk memahami metodologi penelitian dan hasilnya, dan digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis penelitian baru. Tujuan penelitian sebelumnya sendiri adalah untuk mengetahui apakah penulis melakukan kesalahan atau tidak. Adapun judul yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah “ Strategi Pemenangan Partai Nangro Aceh (PNA) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Aceh Selatan.” Tentu saja, judul yang diajukan oleh penulis memiliki hubungan ilmiah dengan penelitian sebelumnya. Untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan penulis gunakan sebagai bahan rujukan awal atau sebagai bahan perbandingan. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang di tulis oleh Teuku Muzaffarsyah, M. Akmal dan Fitriatulani Sikumbang yang berjudul “Strategi calon legislatif perempuan partai demokrat dalam memobilisasi dukungan pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota lhokseumawe”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Fokus Penelitian ini adalah mengkaji pola rekrutmen caleg perempuan dan mempelajari keterwakilan perempuan dalam institusi politik. kajian ini dilakukan di Partai Demokrat Kota Lhokseumawe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut

Anshori untuk menentukan atau membuat strategi ada tiga tahap proses strategi. Pertama, Perumusan strategi, dilakukan dengan melihat berbagai indikator seperti visi misi, peluang serta ancaman baik internal maupun eksternal untuk pemenuhan tujuan jangka panjang. Kedua, pelaksanaan strategi yaitu melakukan sebuah penetapan tahunan dalam memotivasi anggota dan alokasi sumber daya yang dengan menciptakan sebuah kebijakan yang dapat melaksanakan sebuah rumusan strategi. Ketiga, evaluasi strategi yaitu cara untuk mengetahui informasi mengenai strategi yang telah digunakan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Keseluruhan strategi yang direncanakan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari apa yang terjadi baik di internal maupun eksternal sebuah instansi.

Strategi politik adalah suatu usaha untuk dapat memenuhi keinginan politik yang dilakukan secara berkala. Strategi politik digunakan dalam rangka perebutan kekuasaan saat tahun-tahun politik atau mendekati pemilihan umum setiap peserta pemilu akan melakukan perencanaan yang matang mengenai strategi yang akan dilakukan untuk memenangkan kompetisi. Strategi yang direncanakan juga berkaitan dengan kampanye (Schroder, 2016) yaitu memperoleh kemenangan dengan capaian hasil (suara) yang maksimal di pemilu. Dalam sebuah strategi yang terpenting adalah bagaimana untuk merealisasikan tujuan awal yaitu tentunya dalam sebuah strategi yang berkaitan dengan pemilihan umum yang tidak lain adalah sebuah “kemenangan”. Mencapai kemenangan tentunya tidak mudah sehingga diperlukan perencanaan strategi yang matang. Adapun Hasil penelitian yaitu caleg perempuan Partai Demokrat menggunakan strategi yang berbeda dalam Pileg 2019 yaitu menggunakan konsep perubahan dengan mengubah kampanye menjadi pemberdayaan masyarakat dan